



KOTA NUSANTARA BAKAL JADI MUARA BERAGAM ETNIS DAN BUDAYA INDONESIA



**OPTIMALKAN PELAYANAN
MASYARAKAT, PEMKAB PPU
BAKAL ASSESSMENT KINERJA PNS**



Presiden Jokowi ketika tiba di lokasi Puncak Acara Festival Harmoni Budaya Nusantara di Lapangan Taruna Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (3/11/2023) (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)

KOTA NUSANTARA BAKAL JADI MUARA BERAGAM ETNIS DAN BUDAYA INDONESIA

PENAJAM - Kota Nusantara, ibu kota negara Indonesia baru yang dibangun pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yakni di Kecamatan Sepaku, bakal menjadi muara berbagai macam etnis dan budaya di Indonesia.

"Masyarakat Sepaku sebagai warga lokal ibu kota negara baru Indonesia, tentu nantinya akan tinggal serta hidup bersama masyarakat dari beragam etnis dan budaya," kata Presiden Joko Widodo ketika menghadiri Festival Harmoni Budaya Nusantara di Penajam, Jumat (3/11/2023).

Puncak Acara Festival Harmoni Budaya Nusantara 2023 itu digagas Kementerian Koordinator Pembedayaan dan Kebudayaan (Kemendukhamk), digelar di Lapangan Taruna Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pembangunan dan perkembangan Kota Nusantara men-

jadi muara berbagai etnis serta budaya, yang akan saling berinteraksi, jelas Presiden Jokowi, diharapkan masyarakat dapat hidup rukun dan harmonis.

"Masyarakat harus menjaga, melestarikan serta mengembangkan identitas budaya lokal serta nilai dan masyarakat di Kalimantan Timur," tambahnya.

Sehingga perlu dibangun secara bersama menyangkut pentingnya kesadaran sikap saling menghormati dan menghargai, lanjut Jokowi, yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekuatan membentuk harmoni kebersamaan serta kesatuan bangsa.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pelestarian kebudayaan merupakan salah satu faktor utama yang harus dilakukan dalam pembangunan dan perkembangan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia bernama Nusantara.

Merawat kebudayaan yang

ada harus dilakukan secara berkesinambungan, kata dia, jangan sampai tergerus budaya asing, artinya kekuatan karakter budaya di Indonesia penting untuk diperhatikan dan dirawat secara bersama-sama.

"Kami apresiasi Festival Harmoni Budaya Nusantara di Kecamatan Sepaku, sebagai pengingat beragam etnis dan budaya di Indonesia," ujarnya.

Etnis serta budaya di Indonesia sangat beragam dan majemuk, ada sekitar 714 suku yang tersebar di wilayah Indonesia, sehingga keharmonisan dan kesatuan bangsa sangat penting sebagai kekuatan negara Indonesia.

Berbagai suku itu merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang harus menjadi satu kesatuan untuk menjaga Negara kesatuan Republik Indonesia, demikian Presiden Jokowi. (Ant/MK)

Oleh : Nyaman Bagus Purwaniawan

Editor : Agus Setiawan



Presiden RI Joko Widodo memberi sambutan pada acara Festival Harmoni Budaya Nusantara 2023 yang disaksikan melalui tayangan video, Jumat (3/11/2023). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

PRESIDEN JOKOWI MINTA MASYARAKAT DARI BERAGAM ETNIS HIDUP HARMONIS DI IKN

PENAJAM - Presiden RI Joko Widodo meminta masyarakat dari beragam etnis dan budaya yang menjadi penghuni di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur dapat hidup harmonis.

Presiden menjelaskan bahwa masyarakat yang sejak dulu tinggal di wilayah sekitar IKN akan hidup berdampingan dengan masyarakat dari daerah lain setelah pemerintah melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

"Dengan pembangunan IKN, Kalimantan Timur khususnya akan menjadi muara bertemunya berbagai budaya berinteraksi. Kita harapkan berinteraksi dengan baik, hidup rukun, dan harmonis, menjaga, melestarikan, mengembangkan identitas budaya lokal, nilai-nilai, dan tradisi masyarakat di Kalimantan Timur," kata Presiden Jokowi saat memberi sambutan pada acara Festival Harmoni Budaya Nusantara 2023, Jumat (3/11/2023).

Dengan pembangunan IKN, Presiden Jokowi meminta perlunya dibangun kesadaran bersama, sikap saling menghormati, saling menghargai keragaman, dan menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah kekuatan untuk membangun harmoni, kebersamaan, dan persatuan.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa selama tiga bulan tera-

khir, Kepala Negara mengunjungi IKN untuk melakukan peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur.

Sejauh ini, ada lima hotel besar dalam proses pembangunan, empat rumah sakit dalam proses konstruksi, sekolah bertaraf internasional, dua pusat perbelanjaan, hingga pusat latihan PSSI yang memiliki delapan lapangan bola di IKN.

Namun demikian, Presiden menekankan pembangunan sumber daya lebih penting di IKN agar budaya di Kalimantan Timur dan Indonesia tidak tergerus oleh budaya asing.

"Itu semuanya fisik. Padahal mestinya yang didahulukan adalah pembangunan sumber daya manusia, pelestarian kebudayaan, merawat kebudayaan yang ada, jangan sampai nanti tergerus oleh budaya-budaya dari luar, budaya-budaya asing," kata Presiden.

Oleh karenanya, Presiden mengapresiasi terselenggaranya Festival Harmoni Budaya Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, untuk mengingatkan seni dan budaya Indonesia beragam serta majemuk.

"Sukunya saja kita memiliki 714. Artinya, kekuatan, karakter, budaya itu sangat, dan harus kita lestarikan dan harus kita rawat," kata Jokowi. (Ant/MK)

Pewarta : Mentari Dwi Gayati
Editor : Herry Soebanto



Pj Bupati PPU Makmur Marbun. (Robbi/MediaKaltimGroup)

ASSESSMENT KINERJA PNS, PEMKAB PPU BAKAL LIBATKAN UNIVERSITAS TERNAMA

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) melakukan assessment kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan. Dalam hal ini, Pj Bupati PPU Makmur Marbun bakal melibatkan tim dari kampus ternama di Indonesia.

Assesment atau evaluasi kinerja untuk aparatur sipil negara (ASN) ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat. Dengan begitu, kinerja masing-masing PNS dapat disesuaikan dengan bidangnya.

"Seperti kesesuaian bidang tugas pegawai dengan kompetensinya menjadi hal penting untuk sesuai," tuturnya, Jumat (3/11/2023).

Selain itu, untuk memastikan berbagai bidang yang dijabat ini sesuai dengan kompetensinya. Jika nantinya ada pegawai dianggap tidak sesuai dengan bidangnya, maka harus ada penyesuaian, atau dalam beberapa kasus, mutasi.

"Perlu evaluasi kinerja untuk menjadi saran dan masukan kepada saya dan tim untuk melihat kelayakan serta kesesuaiannya. Kalau sudah sesuai ngapain harus dimutasi," ucapnya.

Langkah-langkah ini diharapkan akan membantu menciptakan PNS yang kompeten. Dapat memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas di sektor pemerintahan.

Makmur menyebutkan telah meminta bantuan dari berbagai pihak. Termasuk Pemprov Kaltim dan universitas ternama di Tanah Alr.

"Seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM), untuk membantu dalam proses assessment ini," sebutnya.

Lebih lanjut, Makmur juga mengungkapkan ada beberapa individu yang kemungkinan melakukan bisnis. Tentunya diyakini itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak efisien dan efektif dalam memberikan layanan masyarakat.

"Kalau mau berbisnis jangan jadi pegawai negeri, saya tegaskan kalau kami berbisnis itu enggak bisa, kami memberi pelayanan ke publik. Saya sudah bikin tim sekarang, tim itu benar-benar untuk melihat kesesuaiannya," tutupnya. **(ADV/SBK)**



Pj Bupati PPU Makmur Marbun. (Robbi/MediaKaltimGroup)

OPTIMALKAN PELAYANAN MASYARAKAT, PEMKAB PPU BAKAL ASSESSMENT KINERJA PNS

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) bakal melakukan assessment kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini sebagai komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan pada.

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, menyebutkan assessment kinerja PNS ditujukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan target telah tercapai. Sejalan dengan alokasi anggaran yang direncanakan telah dimanfaatkan.

"Sebenarnya assessment atau evaluasi kinerja itu biasa saja. Saya ingin tahu capaiannya, antara anggaran dan programnya tercapai apa tidak. Kalau program tidak tercapai, berarti tidak ahli dan tidak profesional di bidang itu," ungkapnya, Jumat (3/11/2023).

Tentu harus ada yang bertanggungjawab

atas program yang gagal tersebut. Maka itu, melalui assessment ini akan diketahui sekaligus mempertegas antisipasi masalah muncul di kemudian hari.

"Anggaran sudah disiapkan, tentunya untuk memaksimalkan layanan ke masyarakat. Kalau nggak bisa dilaksanakan, akan Saya pertanyakan apa masalahnya, apakah perencanaannya tidak benar atau seperti apa," tegas Makmur.

Untuk diketahui, evaluasi kinerja itu khususnya akan dilakukan untuk tataran eselon III dan IV. Sebagai pejabat yang juga melibatkan evaluasi kompetensi.

"Yaitu seperti kesesuaian bidang tugas pegawai dengan kompetensinya menjadi hal penting untuk sesuai," tutupnya. (ADV/SBK)



WABUP RENDI SOLIHIN KOMITMEN BERIKAN RUANG UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DI KUKAR



**Bupati Edi Damansyah Sarankan
Masyarakat untuk Manfaatkan
Program Kredit Kukar Idaman**



Suasana penyandang disabilitas di Kukar yang mendapat ruang di publik. (Istimewa)

WABUP RENDI SOLIHIN KOMITMEN BERIKAN RUANG UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DI KUKAR

TENGGARONG- Komitmen kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak dan penyediaan ruang di tengah masyarakat, untuk penyandang disabilitas terus ditunjukkan oleh Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, untuk menyediakan ruang bagi penyandang disabilitas. Ditunjukkan dengan menyediakan lokasi yang ramah bagi penyandang disabilitas, misalnya saat menyaksikan konser KukarLand Festival pada September lalu.

Selain itu, para penyandang disabilitas juga turut diundang dalam upacara Hari Sumpah Pemuda, yang digelar di Halaman Kantor Bupati Kukar pada Sabtu, 28 Oktober 2023 lalu.

Pemerintah tidak hanya mengundang penyandang disabilitas dalam setiap acara, tetapi juga memberikan dukungan yang lebih lanjut. Bahkan Rendi telah mengin-

struksikan Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, untuk melakukan pendataan penyandang disabilitas di Kukar. Terutama mereka yang memiliki kemampuan khusus, baik dibidang olahraga atau wirausaha.

“Memang sudah ada beberapa (disabilitas) di kecamatan yang memiliki prestasi. Sebab itu harus kita dukung dan berkembang bersama,” tambah Rendi Solihin, Jumat (3/11/2023).

Rendi menyadari bahwa, Kukar memiliki beberapa atlet yang berprestasi diajang paralimpik. Bahkan mereka mampu bersaing di kancah nasional. Begitu juga dengan penyandang disabilitas yang memilih untuk berwirausaha.

Rendi mengatakan, Pemkab Kukar siap memberikan dukungan. Ia berjanji bahwa pemerintah akan berkoordinasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memfasilitasi usaha mereka. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Bupati Kukar, Edi Damansyah. (Istimewa)

Bupati Edi Damansyah Sarankan Masyarakat untuk Manfaatkan Program Kredit Kukar Idaman

TENGGARONG- Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, mengimbau masyarakat agar memanfaatkan program Kredit Kukar Idaman (KKI). Jika membutuhkan akses permodalan untuk membuka usaha. Diketahui, KKI sendiri merupakan program yang dirancang khusus oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin memulai usaha namun terkendala modal. Dengan bunga nol persen, masyarakat bisa mengakses program ini melalui Bankaltimtara.

Edi meminta masyarakat untuk berhenti meminjam uang ke rentenir dan mulai mengembangkan peluang usaha. Mengingat program ini dapat diakses untuk pelaku usaha, petani dan juga nelayan.

"Hentikan meminjam uang ke rentenir, manfaatkan Kredit Kukar Idaman melalui Bankaltimtara dengan persyaratan mudah dan bunga nol persen," katanya.

Skema kredit ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses kredit melalui bank. Dengan persyaratan yang sangat minim. Alokasi kredit ini dirancang oleh Pemkab Kukar dengan mengalokasikan penyertaan modal kepada Bankaltimtara untuk dapat berkontribusi bagi pengembangan perekonomian daerah disektor riil.

Program KKI merupakan bagian dari 23

Program Dedikasi Kukar Idaman yang telah dicanangkan dalam filosofi pembangunan Kukar Idaman 2021-2026. Ini juga bagian dari Program Usaha Kecil Idaman yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing produk UMKM.

Targetnya memperkuat kapasitas usaha melalui akses permodalan, perluasan jaringan pemasaran dan peningkatan kualitas produk. Edi menginginkan, program KKI dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan bagi peningkatan potensi usaha masyarakat yang lebih terarah dan berkesinambungan.

"Saya meminta Dinas Koperasi dan UMKM dapat mengiringi keberadaan kredit UMKM dengan menyediakan wadah konsultasi dan penguatan kompetensi melalui Klinik UMKM di setiap kecamatan ataupun zona yang memiliki potensi UMKM yang paling potensial," pinta Edi.

Pemkab Kukar juga memfasilitasi seluruh UMKM agar dapat masuk dalam sistem pemasaran digital, sehingga syarat-syarat yang harus disediakan oleh UMKM keseluruhannya akan difasilitasi oleh Pemkab Kukar. Seperti sertifikat halal dan sertifikat kelayakan produk lainnya, harapan Edi seluruh pelaku UMKM dapat menyambut dan mendukung skema kolaborasi ini dengan baik. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Sekkab Kukar, Sunggono (Istimewa)

Pemkab Terus Mendukung Penggunaan QRIS di Kukar

TENGGARONG- Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, terus mendorong penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh masyarakat.

Sunggono mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar akan senantiasa membantu Bank Indonesia (BI), dalam melakukan sosialisasi terhadap penggunaan sistem pembayaran secara digital tersebut di Kukar.

"Kami terus mendorong masyarakat untuk menggunakan QRIS karena sistem ini dibuat demi mempermudah pembayaran, termasuk untuk keamanan transaksi keuangan," ujarnya.

Selain itu, dalam hal pembayaran pajak, Kukar juga mulai menggunakan transaksi digital. Dengan meluncurkan program Sistem Pajak Online, Bangun Tidur Etam Bisa Bayar Pajak (Si Pajol Betijak).

Yakni inovasi digitalisasi pajak daerah, untuk memudahkan para wajib pajak membayar tagihan pajaknya melalui QRIS. Sehingga wajar pihaknya turut mendorong masyarakat menggunakan QRIS. Apalagi melalui Si Pajol Betijak dan QRIS ini, Pemkab Kukar kemudian berhasil menerima penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 3 Oktober lalu.

Yaitu penghargaan bidang Percepatan

dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) atas keberhasilan perluasan sistem pembayaran melalui digital. Penghargaan diberikan karena inovasi Si Pajol Betijak berjalan dengan baik sepanjang 2022. Inovasi ini sebenarnya sudah berjalan sekitar tiga tahun, tetapi sistem ini diupayakan terus disempurnakan tiap tahun dan pada 2022 berjalan dengan baik.

Selain itu, pihaknya juga terus mendorong pelaku UMKM untuk menggunakan QRIS. Agar masyarakat yang telah memiliki QRIS juga bisa membayar dengan uang digital.

Ia juga mengatakan bahwa kontribusi BI Provinsi Kaltim terhadap perkembangan ekonomi di Kukar selama ini cukup baik. Terutama melalui pendampingan dan bantuan kepada petani, nelayan, UMKM, hingga tempat wisata, sehingga ia berharap kerja sama ini terus berlanjut, bahkan ditingkatkan.

"Di Kukar terdapat ada sekitar 60 ribu UMKM. Dari jumlah ini memang masih ada yang belum menggunakan QRIS karena tidak semua UMKM berada di daerah perkotaan. Meski demikian, kami sarankan UMKM yang di pedesaan sebaliknya mengunduh QRIS, untuk persiapan ketika ada pembeli yang ingin membayar pakai QRIS," pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Sekkab Kukar, Sunggono. (Istimewa)

Pemkab Kukar Dorong Penerbitan Aturan Penguatan Masyarakat Hukum Adat

TENGGARONG- Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, turut mendukung perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kukar. Hal ini disampaikan saat, Sunggono menghadiri undangan penguatan panitia pengakuan dan perlindungan MHA beberapa waktu lalu.

Menurutnya, di Kukar terdapat komunitas masyarakat hukum adat yang sedang berupaya untuk ditingkatkan. Sehingga ia turut mengapresiasi agenda-agenda semacam ini. "Di Kukar sendiri terdapat beberapa komunitas masyarakat hukum adat yang saat ini sedang kita upayakan untuk ditingkatkan statusnya," kata Sunggono.

Hanya saja, dalam pelaksanaannya Sunggono menegaskan masih diperlukan kajian yang mendalam dari instansi terkait di lingkungan Pemkab Kukar. Mengingat, sampai hari ini Kukar belum memiliki peraturan daerah (perda) maupun peraturan bupati (perbup) terkait hal tersebut.

"Ini kan memang perlu kajian yang mendalam, khususnya kita sendiri belum mempunyai perda perlindungan hukum

adat, nanti kita coba buat kan perbubnya, bisa kita bentuk timnya," ujarnya.

"Tim inilah nantinya yang akan bekerja untuk memastikan apa kah memang komunikasi hukum adat yang ada di Kukar itu bisa ditingkatkan statusnya," sambungnya.

Sunggono berharap perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar juga bisa memahami bagaimana konsep perlindungan masyarakat adat. Hal ini diperlukan untuk menetapkan status desa yang bisa ditingkatkan statusnya.

Diketahui saat ini Kukar telah memiliki beberapa Masyarakat Hukum Adat. Diantaranya, Kutai Adat Lawas Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun Darat dan Kenyah Lepo Bem Desa Lekaq Kidau, Kecamatan Sebulu.

Kemudian, Kenyah Lepo Jaalan Desa Lung Anai, Kecamatan Loa Kulu, Sungai Bawang Desa Sungai Bawang, Kecamatan Muara Badak, Punan Bekatan Desa Muara Tuboq, Kecamatan Tabang, dan Kenyah Long Lalang Desa Long Lalang Desa Tabang. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



NARKOBA MERAJALELA, AGUS HARIS: TUTUP SEMUA AKSES!

BACA HALAMAN A2



KLINIK OBGGIN DI RSUD BONTANG PINDAH KE GEDUNG BARU



Agus Haris, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang. (dwi).

Narkoba Merajalela, Agus Haris: Tutup Semua Akses!

BONTANG – Guna mencegah peredaran narkoba, pemerintah diminta untuk menutup semua akses yang ada. Agar para pengedar narkoba tidak mudah menjajakan barang haram tersebut di tengah-tengah masyarakat.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris saat dihubungi redaksi.

"Kalau saya pikir, tutup semua akses dan sumber masuknya sabu dan obat-obatan. Jika lewat darat, maka jalur darat harus diperkuat, begitupun semuannya," paparnya saat dihubungi via telepon, Jumat (03/11/2023).

Aparat pemerintah harus kuat, selain

itu pihak dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pun juga wajib membantu. Ini yang menjadi sistem pemerintah sekarang, harus ada keputusan dan formula dari atas, dan tidak mungkin seperti pemerintah daerah tidak tahu sumber masuknya obat-obat tersebut.

"Pemerintah harus membuat sistem yang super ketat terhadap soal ini, mana mungkin pemerintah tidak tahu akses mana saja yang bisa masuknya jejaring narkoba," ucapnya.

Narkoba dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang dapat menye-

babkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, serta gangguan jiwa lainnya.

AH sapaannya juga menambahkan, terkait narkoba ini Indonesia sudah memasuki situasi yang sangat darurat. Sudah menjadi alarm untuk para pengedar dan pengguna narkoba. Ini sudah termasuk ancaman yang sangat besar dan berat, bahkan serius.

"Ancaman bagi masa depan bangsa, bahkan pengguna dan pengedar bukan lagi umur 40 ke atas, bisa jadi bahkan di kalangan anak-anak yang masih menduduki bangku sekolah," tutupnya. (dwi/adv).



Agus Haris, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang (dwi).

AH Usulkan Buat Penangkaran Sebelum Buaya Riska Dikembalikan

BONTANG – Rencana Buaya Riska dikembalikan ke habitat asalnya di Sungai Guntung mendapat tanggapan Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris. Menurutnya, sebelum dikembalikan sebaiknya dibuatkan penangkaran buaya terlebih dahulu.

Dikatakan AH sapaannya, apabila Buaya Riska ingin dikembalikan ke asal mulanya, maka selayaknya harus dibuatkan penangkarannya terlebih dahulu. Mengingat kejadian beberapa lalu, ada korban terkaman buaya.

"Adanya penangkaran, Buaya Riska tidak akan kembali ke sungai lagi," ucapnya saat diwawancarai via telepon, Jumat (03/11/2023).

Apabila Buaya Riska ingin dikembalikan, maka perlu juga mengadakan rapat. Sebab, sewak-

tu ingin direlokasikan pun diputuskan bersama-sama.

Untuk perpindahan Buaya Riska pun sangat memerlukan tempat yang lebih baik dan aman. Bahkan nantinya, jika Buaya Riska sudah berpindah tempat, bisa jadi salah satu objek wisata di Kota Bontang.

"Buaya Riska ini tidak main-main ukurannya, sangat besar. Bahkan bisa mengancam nyawa manusia, jadi harus dirembuk dulu sebelum dipulangkan," bebernya.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, mau gimana pun buaya ini merupakan makhluk yang berada di bawah pengawasan. Pengembangan wisata Buaya Riska ini harus dilakukan dengan berhati-hati dan penuh tanggung jawab. (dwi/adv).



Ruang tunggu pasien di gedung utama tempat pendaftaran di RSUD Taman Husada Bontang. (Yahya Yabo)

Klinik Obsgin di RSUD Bontang Pindah ke Gedung Baru

BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang kembali memindahkan klinik rawat jalan ke gedung B yang baru, yaitu klinik obsgin. Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada pasien yang datang ke klinik Obsgin.

Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu RSUD Taman Husada Bontang, dr Tri Ratna Paramita mengatakan, pemindahan klinik obsgin telah dilakukan pada pekan lalu. Saat ini klinik obsgin mulai beroperasi seperti semula.

“Karena ada pengembangan layanan, jadi kami pindahkan klinik obsgin bersama klinik lainnya ke gedung baru. Poli klinik gedung lama sudah terbatas, karena ada pengembangan layanan MRI, jadi harus kami geser ke gedung baru,” kata dr Mita saat dikonfirmasi, Kamis (2/11/2023).

Terdapat 12 klinik yang pindah ke gedung baru RSUD Bontang. Tujuan pemindahan klinik yakni dengan memberikan kenyamanan pada pasien yang

sedang menunggu.

“Harapannya dengan pemindahan klinik obsgin dan klinik lainnya, agar memberikan kenyamanan kepada pasien pada saat di ruang tunggu. Karena ruang tunggu di gedung lama sudah dirasa semakin sempit. Dengan sekali kunjungan bisa sampai lebih 200 pasien setiap hari. Dengan klinik Obsgin di gedung baru sudah menjadi lebih nyaman karena ruang tunggu lebih luas,” paparnya.

Selain itu, fasilitas yang ada di klinik gedung baru juga memiliki fasilitas yang sama dengan fasilitas sebelumnya. “Fasilitasnya lebih kurang sama dengan klinik sebelumnya di gedung utama,” ungkapnya.

Selain klinik Obsgin, poli klinik anak juga telah berpindah ke gedung baru yang juga memberikan keleluasaan bagi ruang tunggu anak-anak. “Kasih kalau pasien anak-anak berdesak-desakan dengan pasien lainnya,” terangnya. (adv/yah)



Ilustrasi (ist)

DPMPTSP Bontang Terima Aduan Secara Offline Maupun Online

BONTANG - Pengelolaan sistem pengaduan bagi instansi pemerintah penting adanya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat menjadi optimal. Selain itu, adanya kanal pengaduan juga menjadi kesempatan bagi sebuah instansi untuk melakukan evaluasi serta perbaikan jika adanya sebuah pengaduan.

Terdapat beberapa platform pengaduan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dapat diajukan, terutama via online melalui website DPMPTSP khususnya perizinan digital, Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), ataupun secara offline yang bisa langsung ke kantor DPMPTSP.

"Kalau SP4N LAPOR itu milik Diskominfo yang isinya tentang pelaporan layanan, kami ada admin

yang ngecek itu rutin," jelas Isma Istihari, Japfung Penata Perizinan DPMPTSP.

Isma menjelaskan, bahwa setiap pengaduan yang diterima pihaknya akan segera ditangani. Langkah awal yang mereka lakukan adalah memastikan kebenaran informasi dari pengadu.

"Kami pastikan dulu identitas si pengadu agar bisa kami tanyai terkait keluhannya, ada yang anonim kadang," jelasnya.

Pengaduan yang diterima pada tahun ini hingga bulan Juni 2023 berjumlah 7 aduan, dengan 6 aduan selesai penanganan dan 1 aduan dalam proses penanganan.

"Tidak ada aduan yang terlalu besar, seperti website yang bermasalah sedikit, tapi kami pasti langsung perbaiki hari itu juga, tidak ada yang berlarut-larut," tambahnya. (sya/adv)

Desa Wisata Maju Terdepan, Pendidikan Jangan Terabaikan

KAMPUNG atas air Malahing yang terletak di pesisir timur Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan baru saja terpilih sebagai juara 3 kategori Kampung Wisata Maju dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Malahing kini berubah wajah, dulu dikenal sebagai kampung nelayan penghasil ikan dan rumput laut, saat ini telah bertransformasi dalam tataran ekonomi baru, sebagai objek wisata andalan di Kota Bontang dengan kultur dan keanekaragaman hayatinya. (Kaltimtribunnews.com)

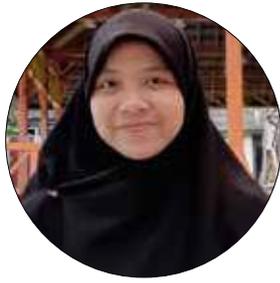
Sementara itu dikutip dari laman klikkaltim.com, Tercatat saat ini ada 10 siswa yang harus berangkat setiap pagi dari kampung di atas laut menuju ke darat. 6 siswa diantaranya harus menyewa kapal dengan iuran setiap bulan Rp 300 ribu. Sementara 4 siswa lainnya menggunakan kapal pribadi milik orang tua. Biaya yang besar itu memang sangat memberatkan warga.

Sulitnya anak sekolah di Kampung Malahing RT 30 Tanjung Laut Indah untuk pergi ke sekolah yang berada di darat itu disebabkan Sekolah Dasar (SD) di Kampung Malahing hanya sampai kelas 5. Sementara untuk melanjutkan ke kelas 6 harus di SD YPPI yang berada di Jalan WR Soepratman Tanjung Laut.

Pendidikan Jangan Terabaikan

Menjadikan desa lebih baik dengan kecanggihan teknologi dan informasi agar membawa manfaat bagi masyarakat setempat tentu tidak masalah. Namun juga perlu kehati-hatian akan keseimbangan alam yang ada jangan sampai alih-alih memanfaatkannya namun malah merusak dan mengeksploitasi sumber daya alam disana.

Belum lagi dengan seiring berjalannya zaman sangat berpotensi akan mempengaruhi sosial juga bu-



Oleh:

Annisa Putri, S.Pd

Pendidik

daya yang bisa semakin liberal dan merusak masyarakat khususnya pemuda.

Selanjutnya, selain mengajak warga semangat bergerak atau berdaya untuk memajukan ekonomi kreatif, baiknya turut juga perhatikan sektor penting lainnya seperti pendidikan di sana. Melihat realita yang ada nampaknya terdapat paradig-

ma keliru dari pemerintah memandang prioritas yang lebih mementingkan wisata dari pada pendidikan.

Padahal sudah diketahui bersama bahwa pendidikan sangatlah urgent posisinya sebab disanalah anak mendapat berbagai ilmu pengetahuan, pengajaran membentuk moral dan adab yang tentu akan bermanfaat bagi kehidupannya kelak.

Namun, begitulah imbas adanya sistem Kapitalisme yang menaungi hari ini, sistem yang semua aspek berpusat pada material alias duit. Maka wajar mengharuskan masyarakat untuk berlomba-lomba dapat cuan, hingga akhirnya semakin lama rasa butuhnya pada sebuah pendidikan atau ilmu terkikis bahkan bergeser lalu tergantikan dengan hal-hal yang materialistik.

Islam memuliakan Ilmu

Islam memiliki sistem yang komperhensif untuk mengatur kehidupan manusia, tak terkecuali perihal pendidikan. Dalam Islam, pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi negara secara cuma-cuma alias gratis untuk masyarakat. Kesadaran kuat akan perintah Allah atas wajibnya menuntut ilmu, membuat negara secara maksimal menyelenggarakan pendidikan.

Mulai dari membangun sekolah yang terjangkau di wilayah masyarakat, bangunan-bangunan yang kokoh, fasilitas penunjang yang lengkap seperti laboratorium-lapangan-perpustakaan, juga tak lupa adanya tenaga pendidik yang berkualitas dan lainnya yang ke-

semua itu dilakukan dengan cara terbaik agar tersampainya ilmu pengetahuan bagi umat.

Disamping itu, pendidikan dalam Islam juga didasari oleh keimanan atau ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Para pelajar ditanamkan akidah Islam yang kuat serta ketaatan kepada perintah Allah, sehingga ilmu pengetahuan apapun yang mereka kuasai nantinya akan menambah iman dan takwa mereka kepada Ilahi Rabbi.

Maka wajarlah, di masa kejayaan Islam dahulu lahir banyak ilmuwan muslim yang cerdas dalam ilmu sains namun juga seorang alim ulama.

Seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Abbas Ibn Firnas, dan masih banyak lagi yang karya-karya mereka masih bermanfaat hingga hari ini bagi peradaban manusia. Maasyaallah!

Selanjutnya, bentuk kecintaan Islam terhadap ilmu pengetahuan juga dapat kita lihat dari lembar sejarah. Bahwa banyaknya perpustakaan-perpustakaan yang berdiri megah membuat banyak manusia bahkan dari penjuru dunia betah menimba ilmu disana.

Hal ini sekaligus meyakinkan kita bahwa bangunan sekolah bukan lagi menjadi persoalan bagi negara, tentu fasilitas sekolah sudah terbangun dengan baik kala itu.

Hal ini bisa terjadi dengan hebat dalam pendidikan Islam tentu tidaklah berjalan sendiri, melainkan dibarengi dengan adanya sistem ekonomi Islam juga sistem politik Islam yang bersumber dari Sang Pencipta. Dengan aturanNya lah, Sumber Daya Alam di negeri tersebut dikelola dengan benar oleh negara secara mandiri tidak dicampuri pihak asing.

Sehingga hasil dari pengelolaan itu diberikan untuk umat, yang mampu mencukupi segala yang dibutuhkan umat. Inilah sedikit gambaran luar biasanya Islam mengatur urusan manusia, segala kemuliaan dan kesejahteraan akan datang manakala Islam diterapkan secara utuh di kehidupan kita hari ini.

Wallahua'alam bisshawab.



JALAN SA MAULANA KEMBALI DAPAT PENGASPALAN, LEGISLATIF AKAN KOORDINASIKAN KE DINAS PUPR



**MESKI PENUNJUKAN DILAKUKAN
KPM, PEMILIHAN DIREKSI PERUMDA
BATIWAKKAL HARUS LELANG**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Jalan SA Maulana dinilai masih mulus, namun mendapat pengaspalan lagi.

JALAN SA MAULANA KEMBALI DAPAT PENGASPALAN, LEGISLATIF AKAN KOORDINASIKAN KE DINAS PUPR

TANJUNG REDEB - Infrastruktur jalan di wilayah perkampungan Kabupaten Berau dinilai masih butuh sentuhan pemerintah. Terlebih banyak yang rusak dan berlubang.

Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga mendorong pemerintah untuk memberi perhatian terhadap jalan yang ada di kampung.

"Jangan terus-terusan jalan yang ada di wilayah perkotaan, apalagi jika masih bagus namun diaspal lagi," tegasnya.

Dirinya mencontohkan, aspal yang ada di Jalan SA Maulana dinilai masih bagus, namun mendapat peningkatan. Sehingga, Saga mengaku akan berkoordinasi mengenai hal tersebut ke Dinas PUPR.

"Jika status jalan itu merupakan milik pemerintah provinsi atau pusat, saya tidak bisa berbuat banyak. Namun, akan tetap saya koordinasikan," tuturnya.

Jika status Jalan SA Maulana milik kabupaten, Saga mengaku sangat menyayangkan hal tersebut. Dinilainya hanya membuang anggaran, sedangkan masih banyak jalan yang ada di wilayah perkampungan membutuh-

kan perhatian.

"Tetapi saya mengakui, kelemahan kami sebagai pengawas pemerintah kurang koreksi terkait anggaran," imbuhnya.

Menurutnya, kepala daerah tidak seharusnya fokus membangun perkotaan saja. Tapi pembangunan harus merata sampai perkampungan. Saga mengingatkan agar memperbaiki jalanan yang memang layak untuk ditingkatkan.

"Ini yang harus dibenahi. Sektor perwakilan Berau, tidak hanya Tanjung Redeb. Tapi masih banyak kampung lainnya," bebernya.

Ditambahkannya, sarana dan prasarana (Sapras) di kampung juga wajib dipenuhi. Mengingat, banyak akses di kampung yang masih butuh perhatian lebih. Maka dari itu, ia meminta kepada bupati dan wakil bupati Berau, tidak menutup mata dengan masalah tersebut.

"Membangun itu tidak hanya di kota saja. Masyarakat kampung juga pasti butuh perhatian akan hal ini," tutupnya. (adv/set)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

MESKI PENUNJUKAN DILAKUKAN KPM, PEMILIHAN DIREKSI PERUMDA BATIWAKKAL HARUS LELANG

TANJUNG REDEB - Masa jabatan Direktur Perusahaan Air Minum Daerah (Perumda) Batiwakkal akan berakhir November ini. Hal itu disorot Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Dia memaparkan, sesuai dengan Perda Kabupaten Berau nomor 2 tahun 2020 tentang perusahaan umum daerah air minum Batiwakkal Berau, pada pasal 39 terkait Direksi dan pasal 41 terkait pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.

"Di dalam peraturan tersebut, kuasa diserahkan kepada Bupati selaku KPM. Untuk pemilihan Direksi harus lelang, meskipun penunjukannya dilakukan KPM, tetapi harus ikuti prosedur yang ada," ungkapnya.

Diketahui, Perumda masuk ke dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan yang termaktub dalam PP nomor 54 tahun 2017, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah.

"Sehingga jika ada pergantian kepemimpinan perusahaan, maka wajib dilakukan lelang secara terbuka dan profesional," katanya.

"Jangan Pelaksana tugas lagi, seharusnya enam bulan sebelumnya, sudah diumumkan, dan dimulai tahapan lelang," sambungnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) itu mengaku sangat menyayangkan jika lelang kem-

bali ditunda. Pasalnya, air bersih merupakan kebutuhan masyarakat banyak.

"Saya khawatir, jika ada kekosongan jabatan akan berdampak kepada pelayanan ke masyarakat. Maka, saya selalu ingatkan KPM untuk mendata, terkait bulan dan tahun seorang pimpinan Perusda berakhir masa jabatannya," bebarnya.

Madri mencontohkan, jangan sampai seperti kepala dinas yang anggap selalu molor dari jadwal. Mendekati beberapa hari masa pensiun, baru dilakukan lelang. Hal itu menurutnya, bisa mandekkan sistem kinerja suatu instansi.

"Seharusnya lelang jauh hari sudah dilakukan. Agar sistem pemerintahan terus berjalan. Tidak mandek karena menunggu kepala dinas definitive," terangnya.

Kendati demikian, Madri Pani menegaskan, roda pemerintahan harus terus berjalan sesuai tupoksinya. Namun jika pimpinan OPD, harus Plt atau PJs, menurutnya kurang tepat. Karena keputusan sulit untuk diambil. Namun jika sudah definitif, pimpinan OPD tersebut, berhak atas OPD yang dipimpin.

"Selama ini saya perhatikan, selalu terlambat, apa Bupati tidak pegang data. Saya harap sekkab baru, bisa mengubah kebiasaan ini," tutupnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman.

SEBUT LEGISLATIF KOMITMEN KAWAL PEMBANGUNAN JEMBATAN MUARA LESAN HINGGA TUNTAS

TANJUNG REDEB - Pembangunan Jembatan Kampung Muara Lesan akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 mendatang.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman merespons positif rencana pembangunan tersebut. Dijelaskannya, anggaran yang digelontorkan sekisar Rp 12 miliar.

"Tetapi nilai tersebut dianggap masih kurang, untuk menyelesaikan pembangunan Jembatan Muara Lesan secara keseluruhan," ungkapnya.

Dijelaskannya, dengan anggaran yang tersedia hanya bisa membuat pondasi jembatan. Maka dari itu, pihaknya akan mengupayakan pembangunan dapat diselesaikan menggunakan penambahan anggaran lainnya selain APBD Berau.

"Kita menginginkan bisa sampai ke tahap rangka jembatan, agar bisa secepatnya terbentuk badan jembatannya," tuturnya.

Upaya penambahan anggaran akan

dirapatkan dengan tim Banggar DPRD Berau. Dibeberkan Sakirman, pihaknya berkomitmen menyelesaikan pembangunan Jembatan di Kampung Muara Lesan tersebut, pasalnya rencana pembangunan sudah mangkrak selama delapan tahun.

"Hal itu juga menjadi rekomendasi KPK untuk diselesaikan. Bahwa bangunan-bangunan yang belum terselesaikan untuk segera dirampungkan, atau paling tidak sudah on progres," bebernya.

Sakirman berharap, pemerintah daerah juga bisa bersama-sama menunjukkan keseriusannya untuk menyelesaikan pembangunan yang belum selesai dengan anggaran yang ada. Salah satunya seperti lanjutan pembangunan gedung baru Disbudpar sekarang sedang berjalan dan tahun depan akan dianggarkan kembali.

"Semoga bisa selesai gedung Disbudpar kita terletak di Jalan Pulau Derawan," harapnya. (adv/set)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah.

KEPALA KAMPUNG TERPILIH HARUS JALANKAN AMANAH YANG DIBERIKAN DENGAN BAIK

TANJUNG REDEB – Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) Serentak di Kabupaten Berau resmi berakhir pada 24 Oktober lalu. Saat ini telah terpilih kepala kampung yang baru di 53 kampung.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiyah berharap, terpilihnya kepala kampung yang baru dapat melahirkan kepala kampung yang memiliki inovasi untuk memajukan kampung dan berdedikasi tinggi untuk kepentingan masyarakat.

“Mudah-mudahan juga dapat menjalankan tugas dan amanahnya dengan baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Pun terus belajar menyesuaikan sistem pemerintahan kampung mulai dari alurnya mengambil kebijakan, kemudian bagaimana profesional untuk kebutuhan dan kemajuan masyarakat kampung.

“Termasuk memiliki inovasi baru untuk kemajuan masyarakat kampung masing-masing,” ungkapnya.

Terlebih harus mampu bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau sebagai instansi teknis yang menangani. Pun harus bisa mensejahterakan warganya.

Utamanya kepala kampung yang baru terpilih tahun ini. Berbeda dengan kepala kampung incumbent atau yang telah memegang suatu jabatan pasti memiliki pengalaman dalam birokrasi dan menjalankan tugasnya. Paling tidak, kata Dia, ada orientasi awal juga yang diberikan dari DPMK Berau bagi mereka.

“Sehingga harapan saya punya inovasi yang baik untuk kemajuan kampung dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto.

INFRASTRUKTUR JALAN HARUS DIPERHATIKAN UNTUK MENDUKUNG AKSES WISATAWAN

TANJUNG REDEB – Selama 10 tahun terakhir, beberapa ruas jalan yang ada di Kecamatan Talisayan belum tersentuh pengaspalan. Hal itu disorot Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto.

Dia mengatakan, seharusnya sudah ada penganggaran untuk beberapa ruas jalan di Talisayan. Terlebih sudah beberapa kali diusulkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

“Sekitar 10 tahun tanpa pengaspalan. Sudah saya usulkan juga kepada Bupati dan Wakil Bupati, termasuk masyarakat menyampaikannya. Agar pengaspalan itu segera dilakukan,” ungkapnya.

Subroto membeberkan bahwa ada beberapa titik ruas jalan yang belum sama sekali mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Bukan hanya pengaspalan, tetapi juga belum dibangun dengan baik.

“Tapi syukurlah usulan kami mendapat respons dari Bupati dan Wakil Bupati, bahwa pada tahun 2024 mendatang akan dilakukan pengaspalan di Talisayan,” terangnya.

Rencana pengaspalan itu, diharapkan Subroto dapat terealisasi. Mengingat APBD Berau cukup besar. Anggaran itu tentu dapat digunakan juga untuk pembangunan jalan yang hampir 10 tahun seakan tidak masuk dalam prioritas.

“APBD Berau sangat besar. Pengaspalan itu penting mengingat sangat mendukung akses wisatawan menuju daerah wisata yang ada di pesisir selatan,” tutupnya. (adv/set)



MELANGKAH DENGAN GAYA, BIRKENSTOCK KINI HADIR DI PENTACITY BALIKPAPAN



**REMAJA DI MANGGAR
ADITEMUKAN TEWAS, POLISI BANTAH
KORBAN PEMBUNUHAN**



MELANGKAH DENGAN GAYA, BIRKENSTOCK KINI HADIR DI PENTACITY BALIKPAPAN

BALIKPAPAN - Produk alas kaki ternama asal Jerman kini telah hadir untuk memanjakan kaki masyarakat Balikpapan. Ya, Birkenstock saat ini telah dibuka di Pentacity Balikpapan.

Outlet Birkenstock yang terletak di UG Floor ini, menyediakan berbagai macam model yang pastinya tetap menciptakan kenyamanan autentik bagi penggunanya.

General Manager Marketing Birkenstock Indonesia, Carmelita Putri mengungkapkan bahwa hingga saat ini Birkenstock tetap berkomitmen untuk tetap memproduksi alas kaki yang memberikan kenyamanan pengguna saat berjalan sesuai dengan keinginannya dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan kaki dalam prosesnya.

"Birkenstock memang dirancang dan dibuat dengan kecermatan serta menggunakan bahan yang berkualitas dan ramah lingkungan," terang Carmelita dalam keterangan persnya kepada MediaKaltim.com, Kamis (2/11/2023).

Maka tak heran, hingga kini Birkenstock di-

anggap sebagai produk klasik dan berhasil sebagai ikon di dunia mode. Model sandal gaya klasik dan ikonik khas Birkenstock antara lain seperti 'Arizona', 'Gizeh', 'Madrid' dan "Mayari".

"Kami juga menghadirkan koleksi terbaru Autumn Winter 2023 dengan suede emboss dan warna-warna keren. Ini adalah tampilan baru dari gaya klasik gaya dan fungsionalitas khas kami," jelasnya.

Diketahui, Birkenstock adalah merek sandal dan sepatu asal Jerman yang sudah menjadi salah satu fashion item populer di Indonesia. Sebenarnya tidak terbatas pada anak muda saja, sandal Birkenstock juga cocok dipakai oleh anak-anak maupun mereka yang berusia lanjut.

Model sandal Birkenstock juga sangat klasik sehingga tak lekang waktu, meskipun tren fashion selalu berubah dari zaman ke zaman. Kualitasnya sandal ini juga tergolong baik, karena sandal ini cukup awet jika dipakai hingga bertahun-tahun.

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



REMAJA DI MANGGAR DITEMUKAN TEWAS, POLISI BANTAH KORBAN PEMBUNUHAN

BALIKPAPAN - Warga RT 18 Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur mendadak ramai, ini disebabkan oleh ditemukannya seorang remaja putri berinisial DA (16) meninggal dunia di rumahnya pada Sabtu (28/10/2023) lalu.

Berdasarkan keterangan seorang warga, Rusmadi, DA ditinggal oleh orang tua dan kakaknya sebelum ditemukan tewas. Saat kembali, orang tua DA menemukan anaknya dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengira hanya pingsan. DA kemudian dibawa ke rumah sakit, namun naas remaja tersebut sudah dinyatakan meninggal dunia.

"Sabtu lalu itu meninggalnya. Orang tuanya sendiri yang nemukan dia meninggal dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ada polisi juga," ujarnya Jumat (3/11/2023).

Orang tua DA kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Timur untuk menyelidiki kasus tersebut.

Dikonfirmasi, Kapolsek Balikpapan Timur, AKP Jajat Sudrajat, membenarkan adanya seorang remaja yang meninggal dunia berinisial DA. Hanya saja, Jajat membantah jika orang tua korban telah membuat laporan polisi atas

kematian DA.

"Mereka sudah dijelaskan oleh Kanit Reskrim kalau perlu visum untuk pembuktian. Sampai sekarang belum ada laporan. Kami mau melangkah, belum ada laporan," ujar Jajat, Jumat (3/11/2023).

Namun begitu, pihaknya telah mengecek langsung kondisi korban setelah berada di Rumah Sakit. Jajat beranggapan, belum menemukan indikasi pembunuhan.

"Pembunuhan dari mana? Saya ada cek waktu di rumah sakit, nggak ada bekas kekerasan. Ketika di rumah sakit, timbul kayak bengkok senormalnya orang meninggal," jelasnya.

Lebih lanjut, Jajat juga enggan memastikan bahwa korban tewas pada Sabtu (28/11/2023) seperti yang diklaim oleh saksi. Demikian lantaran belum ada laporan, sehingga tidak ada dasar kepolisian untuk mengambil tindakan.

Dia menekankan, pihaknya belum berani mengambil kesimpulan atas penyebab kematian DA yang kini jasadnya telah dimakamkan.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA
TERDEPAN

RADAR PASER

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

EDISI SABTU
4 NOV 2023



**BASRI UPAYAKAN KEBUTUHAN
PENUNJANG PETANI DAN NELAYAN
TEREALISASI DI 2025**

**KEJARI PASER AMANKAN BURONAN
KASUS KORUPSI DARI MAMUJU**





Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Paser, Basri Mansur

BASRI UPAYAKAN KEBUTUHAN PENUNJANG PETANI DAN NELAYAN TEREALISASI DI 2025

PASER - Pengadaan pupuk organik, pemeliharaan dan peningkatan tanggul lantai jamur, kebutuhan mesin ketinting hingga meteran air di beberapa Desa, Kecamatan Tanah Grogot jadi harapan warga untuk dapat segera tersedia.

Hal itu berdasarkan serap aspirasi (Reses) yang diluncurkan Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Basri Mansur, di 5 Desa yang ada di Kecamatan Tanah Grogot.

Menanggapi hal itu, Basri mengupayakan bakal memperjuangkan kebutuhan masyarakat setempat, khususnya yang berprofesi sebagai nelayan dan petani. Menurutnya, usulan itu tentu berdampak, dalam menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.

"Jadi kami sudah terima keluhan dan usulan warga di beberapa titik. Mereka menginginkan agar tersedianya fasilitas yang tentu dapat ber-

manfaat bagi warga. Sehingga kita upayakan agar itu terealisasi," kata Basri.

Basri mengaku, masyarakat yang menyampaikan usulan itu menginginkan agar bisa ditunjang dalam menjalankan usaha yang didominasi petani dan nelayan khususnya di Desa Pepara, Tanah Periuk dan Sungai Tuak.

Nantinya, dari usulan itu, diterangkan Basri, disampaikan pada Musrenbang 2024 agar dapat terealisasi di 2025 mendatang. Selain penyampaian di Musrenbang 2024, ia juga akan mencoba mengkomunikasikan dengan OPD terkait.

"Setelah kita sampaikan di Musrenbang, harapannya di 2025 sudah dapat terealisasi, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan kebutuhannya agar dapat menunjang perekonomiannya," lanjut Basri. (Adv)

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



DPO Agus Susanto (batik) saat diamankan Kejari Paser di salah satu warung Desa Senaken.

KEJARI PASER AMANKAN BURONAN KASUS KORUPSI DARI MAMUJU

PASER - Kejaksaan Negeri (Kejari) Paser mengamankan Agus Susanto (40) yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lantaran melarikan diri dari Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat ke Kabupaten Paser.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Paser, Hendi Sinatrya Imran menuturkan buronan dari Mamuju itu diamankan di salah satu warung kopi Gang Ikhsan Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Rabu (1/11/2023) kemarin.

"Saat ini kami titipkan di Polres Paser, menunggu tim dari Kejari Mamuju melakukan penjemputan," kata Hendi, Jumat (3/11/2023).

Lanjut Hendi, Agus merupakan DPO kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan pembayaran hasil penjualan beras komersil di Perum Bulog Sub Drive Mamuju pada 2018 lalu dan mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1222 K/Pid.sus/2022 tertanggal 8 Mei 2022.

Namun pelaksanaan putusannya terhambat dikarenakan Agus tengah berada di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Sehingga Kejari Mamuju mengeluarkan penetapan DPO Nomor R-68/P.6.10/Fu.1/09/2023 tertanggal 15 September 2023.

Mendapatkan informasi itu, Kejari Paser bersama kepala desa dan tokoh masyarakat Senaken melakukan pengintaian untuk mengamankan Agus. "Saat kami amankan dia mengaku memang tersangkut kasus tindak pidana korupsi di Mamuju," jelas Hendi.

Selama berada di Kabupaten Paser, diturkan Hendi jika Agus tinggal di salah satu kontrakan Desa Senaken. Serta kesehariannya penjual pentol keliling. "Kasus tindak pidana korupsi ini negara mengalami kerugian sebesar Rp 1,2 miliar, status AS pemilik UD Usaha Maju pada saat itu yang membeli beras komersil dari Bulog cabang Mamuju," pungkas Hendi.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Sekretaris DPRD Kabupaten Paser, Muhammad Zulkarnain Iskandar

PENILAIAN IEPK DORONG PENINGKATAN KINERJA DI SEKRETARIAT DPRD PASER

PASER - Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) oleh Inspektorat Kabupaten Paser dilakukan guna memberikan penilaian kepada sejumlah pejabat struktural dan fungsional di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser.

Sekretaris DPRD Kabupaten Paser, Muhammad Zulkarnain Iskandar menyatakan, penilaian ini dilangsungkan guna memberikan pemahaman, pengetahuan dalam pelaksanaan indeks efektivitas pengendalian korupsi.

“Untuk mendapatkan nilai IEPK yang baik, Sekretariat DPRD melakukan banyak perubahan, seperti penyusunan matriks kerja sebagai dasar kebutuhan pagu anggaran selama satu tahun,” kata Zulkarnain.

Penilaian IEPK ini, menurut Zulkarnain, merupakan model pengukuran efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan pemerintahan berupa penilaian kemajuan pengelolaan risiko korupsi, serta pemahaman terkait dengan

pengecanaan, pengelolaan, atau pengendalian korupsi.

Zulkarnain mengatakan pejabat kesekretariatan dan keuangan DPRD, lewat matriks kerja, akan mendukung tugas dan fungsi anggota legislatif, seperti penyusunan, pembahasan, dan pengesahan peraturan daerah.

Pagu anggaran dalam satu tahun pada Sekretariat DPRD, menurutnya, sudah diperhitungkan lewat matriks anggaran kerja.

“Manfaatnya, anggaran sekretariat DPRD Paser terukur dan terarah,” ujarnya.

Zulkarnain juga mengapresiasi kegiatan asistensi oleh Inspektorat Daerah. Dia optimistis capaian IEPK pada Sekretariat DPRD Paser meraih hasil yang memuaskan.

“Harapan kami, pemenuhan capaian IEPK Sekretariat DPRD Paser semakin baik. Itu akan mencerminkan kualitas kinerja yang dihasilkan oleh Sekretariat DPRD,” katanya. (Adv)

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI SABTU
4 NOV 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



KALTIM SIAPKAN TENAGA KERJA BERKOMPETEN GUNA DUKUNG PEMBANGUNAN IKN



BHABINKAMTIBMAS SPL DAMPINGI
TIM PUPR, DATA RUMAH KAWASAN
BANTARAN SUNGAI



Acara penutupan program magang di dalam negeri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur pada 1 November 2023. (HO Diskominfo Kaltim)

KALTIM SIAPKAN TENAGA KERJA BERKOMPETEN GUNA DUKUNG PEMBANGUNAN IKN

SAMARINDA - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur mengadakan pelatihan dan program magang dalam upaya menyiapkan tenaga kerja kompeten guna mendukung pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Rozani Erawadi di Kota Samarinda, Jumat (3/11/2023), mengemukakan pentingnya penyiapan sumber daya manusia yang kompeten guna mendukung pembangunan dan pengembangan IKN Nusantara.

Menurut dia, upaya penyiapan tenaga kerja yang kompeten mencakup pelaksanaan program pelatihan dan magang di dalam negeri dengan pembiayaan pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengadakan program magang di dalam negeri bagi total 366 orang dari daerah seperti Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur,

Kutai Barat, Penajam Paser Utara, dan Paser.

"Magang kerja adalah bentuk pendidikan dan pelatihan kejuruan teknis yang menggabungkan off the job training dan on the job training, memungkinkan peserta memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan di perusahaan," katanya.

"Melalui program ini, peserta akan mendapatkan pengalaman kerja di dunia nyata, termasuk keterampilan, sikap mental, etos kerja, perilaku dan budaya kerja di industri," ia menambahkan.

Ia menjelaskan, program magang di dalam negeri yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lamanya lima bulan sedang program yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencakup pelatihan selama satu bulan dan magang selama tiga bulan. (Ant/MK)

Pewarta : Arumanto

Editor : Maryati



BHABINKAMTIBMAS SPL DAMPINGI TIM PUPR, DATA RUMAH KAWASAN BANTARAN SUNGAI

SAMARINDA - Bhabinkamtibmas Kelurahan Sungai Pinang Luar, Polsek Samarinda Kota Polresta Samarinda, Polda Kaltim, Aiptu IDK Sudiana melaksanakan monitoring dan pendampingan Dinas PUPR Kota Samarinda.

Kali ini dalam rangka melaksanakan pensataan terhadap pemilik rumah di kawasan Bantara sungai karang mumus di Jalan KH. Agus Salim Gg. Manunggal RT 32, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota pada Kamis (2/11/2023).

Dalam kegiatan pendampingan dinas

PUPR Kota Samarinda ini, Bhabinkamtibmas bersama Heni Agusindrayani, S.Ap dari PUPR Samarinda bersama Staff juga tutur didampingi Lurah Sungai Pinang Luar Agus Salim beserta Staff, Babinsa Kelurahan Sungai Pinang Luar Sertu Rubianto dan Ketua RT 32, SPL Budiono.

Mereka bersama-sama melakukan pendataan rumah warga. Sebanyak 18 buah rumah yang telah dinyatakan terkena proyek normalisasi bantaran sungai Karang Mumus oleh Pemkot Samarinda. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari



Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang

DPRD KALTIM DAN BBJPN KOORDINASI PERBAIKAN JALAN RUSAK

SAMARINDA - Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBJPN) wilayah Kaltim untuk membahas upaya perbaikan infrastruktur jalan rusak di provinsi ini.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengatakan, banyak ruas jalan provinsi di Kaltim yang rusak berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya agar ruas jalan tersebut menjadi jalan nasional agar mendapatkan anggaran yang lebih besar dan perbaikan yang lebih cepat.

"Kami tetap selalu memperjuangkan bagaimana infrastruktur di Kaltim bisa terbangun dengan baik. Kami berharap banyak anggaran dari pemerintah pusat turun di Kaltim pada 2024. Apalagi, Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN) ke depan," kata Veridiana di Samarinda, Rabu (3/11/2023).

Menurut Veridiana, ada sekitar 1.500 kilometer jalan provinsi di Kaltim yang rusak dan akan diperbaiki dengan dana APBN 2023 sebesar Rp2 triliun. Wilayah yang mendapat prioritas perbaikan antara lain Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan kabupaten lainnya. Selain itu, ada juga dana Rp8 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan jalan di wilayah IKN Nusantara.

Veridiana juga mengkritik lambatnya penanganan jalan longsor di Jalan Anggana Sa-

marinda yang baru mulai diperbaiki setelah satu tahun terjadi. Ia mengatakan, warga terdampak longsor sangat membutuhkan penanganan cepat dan tepat agar tidak mengalami kerugian lebih lanjut.

"Kalau saya melihat itu, warga terdampak longsor di Jalan Anggana Samarinda sangat membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Itu sudah satu tahun (terjadi), baru mulai diperbaikinya. Itu tidak boleh terulang lagi di tempat lain," ujarnya.

Ia menambahkan, dua lokasi lain yang masih dalam pengawasan adalah jalan di Kecamatan Palaran dan Jalan Kecamatan Sambutan, Samarinda. Ia berharap perbaikan jalan di kedua tempat itu sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

Veridiana berharap infrastruktur jalan di Kaltim segera diperbaiki dan diperluas aksesnya agar masyarakat dapat menikmati transportasi lancar dan nyaman. Ia juga yakin pemerintah pusat akan memberikan perhatian khusus kepada daerah ini demi mendukung pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat Kaltim.

"Saya yakin pemerintah pusat juga memperhatikan daerah kami demi mendukung pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat Kaltim," tutupnya. (eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati

KOMISI IV MINTA DINKES BANTU PERCEPATAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN DI KALTIM

SAMARINDA - Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim untuk membantu mempercepat proses akreditasi pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kaltim. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di fasilitas kesehatan dasar seperti Puskesmas.

"Kami minta Dinkes Kaltim untuk aktif membantu akreditasi pelayanan kesehatan di Kaltim. Pelayanan dasar itu harus punya sertifikasi, tidak hanya alat-alat yang cukup, tetapi juga tenaga kesehatan yang mumpuni," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati, beberapa hari lalu.

Menurut Puji, akreditasi adalah salah satu syarat mutlak untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman bagi masyarakat. Rumah sakit yang memiliki peralatan canggih juga harus didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten. Selain itu, Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan terdekat dengan masyarakat juga harus mendapatkan akreditasi agar pelayanannya semakin baik dan tidak menimbulkan penumpukan pasien di rumah sakit.

Puji juga menyampaikan bahwa, saat ini sumber daya manusia kesehatan di Kaltim masih belum merata. Meskipun secara rasio tenaga kesehatan secara keseluruhan sudah

mencukupi, namun sebarannya masih timpang. Terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih sangat kekurangan dokter spesialis.

"Kami minta dokter-dokter spesialis ini juga mau bertugas di pelayanan dasar yang ada di wilayah 3T. Kalau pemerintah menyiapkan fasilitas dan insentif yang memadai, saya pikir itu akan memotivasi mereka," kata Puji.

Puji menambahkan bahwa, Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki dana cukup besar untuk pengembangan kesehatan. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan menyeluruh harus dilakukan. Mulai dari sarana prasarana, penyiapan tenaga medis, hingga reward dan kompensasi bagi tenaga ahli atau dokter spesialis.

"Jangan sampai ada orang mengeluh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," tegas Puji.

Selain itu, Puji juga mengatakan bahwa, pihaknya akan melihat kembali masalah BPJS Kesehatan. Pasalnya, dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin, banyak keluhan di masyarakat tentang pelayanan BPJS Kesehatan.

"Nah itu juga nanti akan jadi fokus kami. InsyaAllah setelah Januari akan dikoordinasikan," pungkas Puji. (Eky/Adv/DPRDKaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



PRIA INI DITANGKAP POLSEK SUNGAI PINANG, USAI TAMPAR DAN PERAS ANAK DI BAWAH UMUR

SAMARINDA - Unit Reskrim Polsek Sungai Pinang ungkap kasus kekerasan dan pemerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh tersangka BS terhadap korban FN pada Rabu (1/11/2023)

Kapolsek Sungai Pinang, Koptol Ahmad Abdullah mengungkapkan bahwa pada Kamis (26/10/2023) FN yang masih duduk di bangku SMP sedang bermain bersama teman temannya di Jalan. Kemakmuran Gg. PLN. Kemudian saat hendak pulang ke rumah tiba-tiba dicegat oleh tersangka BS. Tersangka BS langsung menampar pipi FN lantaran BS kesal dan terganggu oleh aktivitas FN bersama teman-temannya.

"Korban FN hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp 100 ribu dan hal tersebut membuat tersangka BS kembali menampar pipi korban lalu pergi meninggalkan rumah korban," terang Kapolsek.

Medengar kabar tersebut, Ibu FN tidak terima atas apa yang dialami anaknya kemudian membuat laporan di Polsek Sungai Pinang. Personel Unit Reskrim Polsek Sungai Pinang langsung melakukan upa-

ya penyelidikan dengan petunjuk yang ada dan berhasil mengamankan tersangka BS di rumahnya di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Sungai Pinang.

"Saat diamankan tersangka BS mengaku bahwa uang Rp 100 ribu yang didapatnya dari memeras korban telah digunakan untuk membeli makan," tuturnya.

Tersangka BS dijerat dengan pasal Pasal 76.c pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 UU no. 35 tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Juncto Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut dan atau pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda Rp. 100 juta rupiah.

"Tersangka saat ini telah kita amankan sementara untuk korban kami lakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan pendampingan terutama dengan psikologisnya untuk menghindari trauma yang mendalam bagi korban", pungkas Kapolsek. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari



POLRESTA SAMARINDA AMANKAN PRIA BERINISIAL YS, KEDAPATAN KANTONGI 2 POKET SABU

SAMARINDA - Satresnarkoba Polresta Samarinda telah melakukan pengungkapan kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan menangkap satu orang pelaku di Jalan P Suriansyah, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota - Kota Samarinda.

Kasat Resnarkoba Polresta Samarinda menjelaskan kronologis kejadian. Yakni, pada hari Senin (30/10/2023) menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jalan P Suriansyah, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, tepatnya di pinggir jalan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu.

Setelah pelapor dan saksi melakukan observasi dengan cermat, sekitar pukul 00.20 Wita dicurigai 1 orang laki-laki berinisial YS (22) yang sedang berkendara

motor seorang diri dan dilakukan pemberhentian.

Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,85 gram bruto yang terbalut 1 buah tissue warna putih yang berada didalam kantong celana belakang sebelah yang dikenakan YS beserta barang bukti lainnya.

Selanjutnya pelaku YS beserta barang buktinya diamankan di Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya Pelaku dijerat pasal 114 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari

GK Grand Kartika
HOTEL



TOBER

Deluxe Room

ONLY

Rp ~~698.000,-~~ **30% OFF**

Rp488rb

NETT/NIGHT

benefits

<p>Breakfast 2 pax</p> 	<p>FREE Laundry Up To 2 pcs</p> 	<p>FREE Kopi Inspirasi Buy 3, Pay 2</p> 
<p>FREE Afternoon Tea</p> 	<p>FREE Mini Mantou 5 pcs</p> 	

→ BOOK NOW

0811 581 3669
www.hotelgrandkartika.com